



**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG CIPTA KARYA KABUPATEN/KOTA**

Daftar Isi

1.	Definisi.....	4
2.	Outline RPIJM.....	5
3.	Pedoman Penyusunan Bab 1 Pendahuluan.....	9
4.	Pedoman Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota.....	13
5.	Pedoman Penyusunan Bab 3 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya.....	15
6.	Pedoman Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.....	18

Daftar Isi

7.	Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya.....	20
8.	Pedoman Penyusunan Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota.....	25
9.	Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya	27
10.	Pedoman Penyusunan Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya.....	43

1

Definisi

RPIJM

Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Mengapa perlu diperbaharui?

- Pemutakhiran Amanat Pembangunan Bidang Cipta Karya
- Penyesuaian Sasaran Strategis
- Perubahan Nomenklatur Bidang Cipta Karya

2

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Arahannya Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Bab 3. Arahannya Strategis Nasional Bidang Cipta karya untuk Kabupaten/Kota

Bab 4. Profil Kabupaten/Kota

OUTLINE BARU

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kedudukan RPIJM
- 1.4. Muatan RPIJM

Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

- 2.1. Wilayah Administrasi
- 2.2. Potensi Wilayah kabupaten/Kota
- 2.3. Demografi dan Urbanisasi
- 2.4. Isu Strategis Sosial Ekonomi dan Lingkungan Berdasarkan RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota

2

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 5. Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota

Bab 6. Aspek Teknis Per Sektor

Bab 7. Keterpaduan Program Berdasarkan Entinitas

Bab 8. Aspek Lingkungan dan Sosial

OUTLINE BARU

Bab 3. Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang

3.2 Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bab 4. Analisis Sosial Ekonomi dan Lingkungan

4.1 Analisis Sosial

4.2 Analisis Ekonomi

4.2 Analisis Lingkungan

2

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 9. Aspek Pembiayaan

**Bab 10. Aspek Kelembagaan
Kabupaten/Kota**

OUTLINE BARU

**Bab 5. Kerangka Strategi Pembiayaan
Infrastruktur Bidang Cipta Karya**

5.1. Potensi Pendanaan APBD

5.2. Potensi Pendanaan APBN

5.3. Alternatif Sumber Pendanaan

5.4. Strategi Peningkatan Investasi
Bidang Cipta Karya

**Bab 6. Kerangka Kelembagaan dan Regulasi
Kabupaten/Kota**

6.1. Kerangka Kelembagaan

6.2. Kerangka Regulasi

2

Outline RPIJM

OUTLINE LAMA

Bab 11. Matriks Rencana Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

OUTLINE BARU

Bab 7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.1. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

7.2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

7.3. Sektor Pengembangan SPAM

7.4. Sektor Pengembangan PLP

Bab 8. Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

3

Pedoman Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bagian ini berisikan latar belakang penyusunan RPIJM, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, serta Permen PUPR No. 13/RPT/M/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.

Bagian ini juga berisikan latar belakang kebijakan lokal di tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

1.2 Maksud dan Tujuan

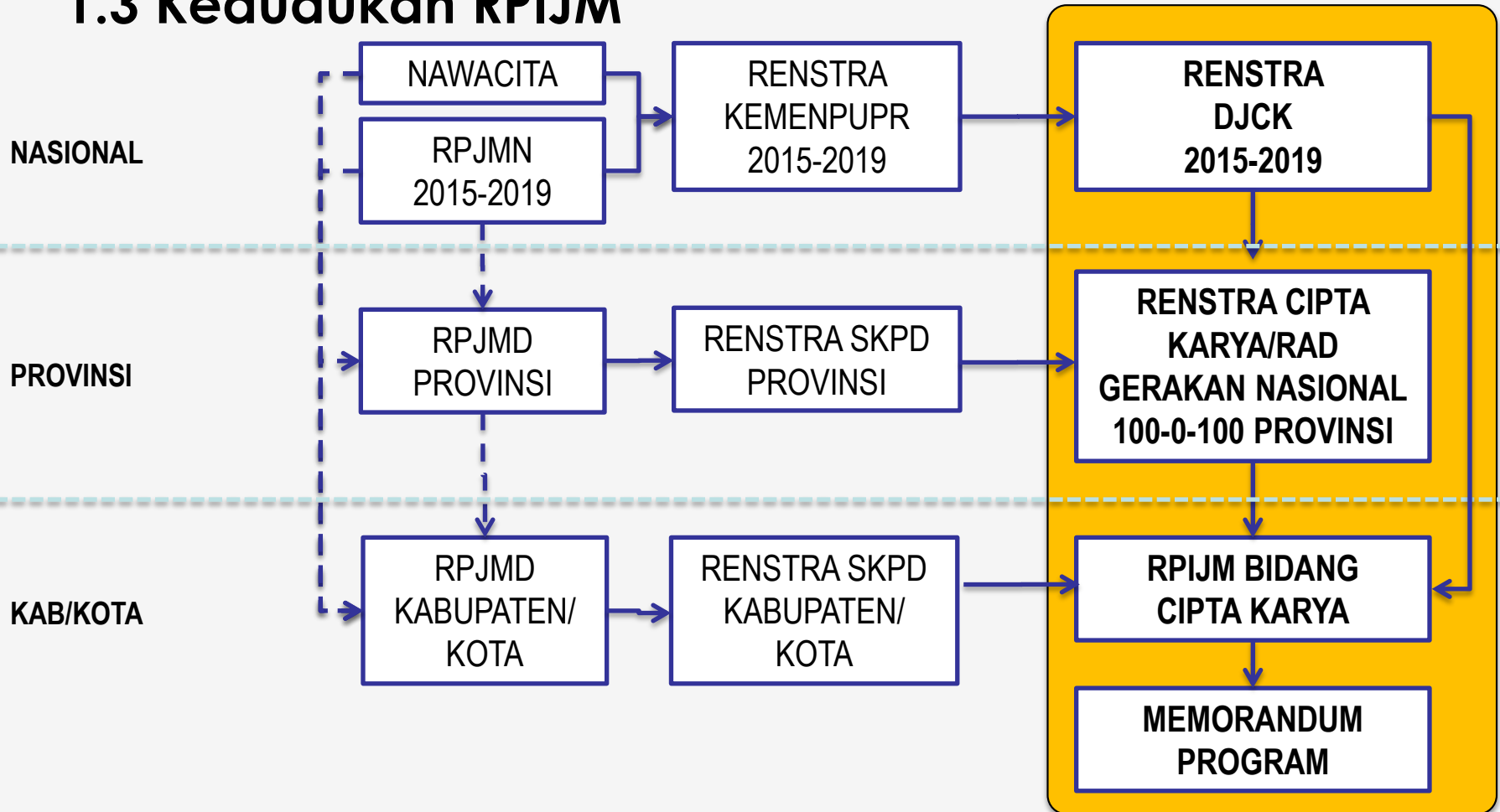
Maksud: mewujudkan kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tujuan: sebagai dokumen acuan dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. RPIJM memuat rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun.

3

Pedoman Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.3 Kedudukan RPIJM



3

Pedoman Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

1.4 Muatan RPIJM

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan RPIJM Bidang Cipta Karya, serta muatan RPIJM Bidang Cipta Karya.

Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

Bagian ini membahas mengenai wilayah administrasi, potensi wilayah, demografi dan urbanisasi, serta isu strategis Kabupaten/Kota.

Bab 3 Arahan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Pada bab ini berisi arahan kebijakan pembangunan Bidang Cipta Karya dan rencana strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Pada Bagian ini membahas tentang analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan analisis kemiskinan.

Bab 5 Kerangka Strategi Pendanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bagian ini membahas mengenai kebutuhan investasi, potensi pendanaan, dan alternatif pendanaan.

3

Pedoman Penyusunan Bab 1 Pendahuluan

Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

Bagian ini membahas mengenai kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang ada di kabupaten/kota.

Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Bagian ini membahas mengenai rencana program investasi infrastruktur Bidang Cipta Karya untuk masing-masing sektor, yaitu sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan SPAM, dan Pengembangan PLP. Pada setiap sektor dijelaskan kondisi eksisting, analisis kebutuhan, serta usulan kebutuhan program dan pendanaan masing-masing sektor.

Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Pada bab ini berisi mengenai matriks program investasi RPIJM Kabupaten/Kota dan matriks keterpaduan program pada kawasan prioritas Kabupaten/Kota

4

Pedoman Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.1 Wilayah Administrasi

Pembahasan mengenai wilayah administrasi antara lain terdiri dari:

- i. Gambaran administrasi wilayah (meliputi: luas wilayah, batas wilayah, serta jumlah kecamatan dan kelurahan)
- ii. Peta wilayah skala 1:50.000 untuk kabupaten
- iii. Peta wilayah skala 1:25.000 untuk kota

2.2 Potensi Wilayah Kabupaten/Kota

Bagian ini berisikan mengenai potensi wilayah yang dimiliki oleh kabupaten/kota, antara lain potensi ekonomi kreatif, pariwisata, minyak dan gas, dan sebagainya, yang perlu didukung pembangunannya dengan infrastruktur permukiman.

4

Pedoman Penyusunan Bab 2 Profil Kabupaten/Kota

2.3 Demografi dan Urbanisasi

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai karakteristik penduduk kabupaten/kota berdasarkan:

- i. Jumlah penduduk dan KK keseluruhan
- ii. Jumlah penduduk miskin dan persebaran penduduk
- iii. Proyeksi pertumbuhan penduduk lima tahun ke depan
- iv. Jumlah penduduk perkotaan dan proyeksi urbanisasi

2.4 Isu Strategis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Bagian ini berisikan, antara lain:

- i. Data perkembangan PDRB dan potensi ekonomi
- ii. Data pendapatan per kapita dan proporsi penduduk miskin
- iii. Data kondisi lingkungan strategis (misal: topografi, geologi, klimatologi dll)
- iv. Data risiko bencana alam
- v. isu-isu strategis terkait pembangunan infrastruktur bidang cipta karya (antara lain capaian pelayanan dan kualitas)

5

Pedoman Penyusunan Bab 3 Arah-an Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.1 Arah-an Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arah-an Penataan Ruang

Bagian ini berisikan tiga sub bagian, yaitu:

- 3.1.1 **Arah-an Pembangunan Bidang Cipta Karya**, berisikan arah-an pembangunan berdasarkan Perpres 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019.
- 3.1.2 **Arah-an Penataan Ruang**, antara lain berisikan arah-an penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (KSN) pada kabupaten/kota sesuai dengan amanat PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Bagian ini juga berisikan arah-an spasial untuk Bidang Cipta Karya berdasarkan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- 3.1.3 **Arah-an Wilayah Pengembangan Strategis**, berisikan arah-an fungsi pengembangan wilayah dan indikasi program di 35 WPS.
- 3.1.4 **Arah-an Rencana Pembangunan Daerah**, berisikan arah-an pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra SKPD terkait untuk pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

5

Pedoman Penyusunan Bab 3 Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.2 Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Bagian ini berisikan rangkuman dari rencana masing-masing sektor di lingkup Cipta Karya, baik untuk sektor pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air minum, dan sanitasi.

3.2.1 Rencana Kawasan Permukiman (RKP), berisikan:

- i. Visi dan misi pengembangan kawasan permukiman
- ii. Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kabupaten/kota
- iii. Penetapan kawasan permukiman prioritas

3.2.2 Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM), berisikan:

- i. Rencana sistem pelayanan
- ii. Rencana Pengembangan SPAM
- iii. Rencana penurunan kebocoran air minum

3.2.3 Strategi Sanitasi Kota (SSK), berisikan:

- i. Kerangka kerja pembangunan sanitasi
- ii. Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi

5

Pedoman Penyusunan Bab 3 Arahkan Kebijakan dan Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

3.2.4 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), berisi:

- i. Progam bangunan dan lingkungan
- ii. Rencana umum dan panduan rancangan
- iii. Rencana investasi

3.2.5 Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya, berisikan rangkuman dari uraian rencana masing-masing sektor ke dalam satu tabel.

Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

NO	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RKP				
2.	RISPAM				
3.	SSK				
4.	RTBL				

Keterangan Pengisian :

(1) Nomor Urut, (2) Dokumen rencana, (3) Status, (4) Arahkan Pembangunan berdasarkan dokumen rencana, (5) Indikasi Program arahan dokumen rencana, (6) Lokasi Kegiatan indikasi program

6

Pedoman Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

4.1 Analisis Sosial

Bagian ini berisikan analisis sosial sebagai dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Beberapa hal penting untuk dibahas, antara lain:

- i. pengarusutamaan gender
- ii. identifikasi kebutuhan penanganan sosial pasca pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

4.2 Analisis Ekonomi

Bagian ini berisikan analisis ekonomi sebagai dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan. Beberapa hal penting untuk dibahas, antara lain:

- i. Kemiskinan
- ii. analisis dampak pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya terhadap ekonomi lokal masyarakat

4.3 Analisis Lingkungan

Bagian ini berisikan analisis lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6

Pedoman Penyusunan Bab 4 Analisis Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Dalam mengidentifikasi analisis sosial, ekonomi dan lingkungan, dapat dimasukkan beberapa hal yang berhubungan dengan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten/kota

Contoh Proses Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya

NO	PENGELOMPOKAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG CIPTA KARYA	PENJELASAN SINGKAT
(1)	(2)	(3)
4.1 Sosial		
1.	Pencemaran menyebabkan berkembangnya wabah penyakit	
4.2 Ekonomi		
1.	Kemiskinan berkorelasi dengan kerusakan lingkungan	
2.	Perkembangan ekonomi lokal dari pembangunan infrastruktur permukiman	
4.3 Lingkungan		
1.	Kecukupan air baku untuk air minum	
2.	Pencemaran lingkungan oleh infrastruktur yang tidak berfungsi maksimal	
3.	Dampak kumuh terhadap kualitas lingkungan	
4.	Dampak perubahan iklim terhadap kawasan permukiman dan upaya mitigasi dan adaptasi yang telah dilakukan	

Keterangan Pengisian :

(1) Nomor

(2), Pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan lingkungan)

(3), Penjelasan singkat terkait isu pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi dan lingkungan)

7

Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.1 Potensi Pendanaan APBD

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Matriks Potensi Pendanaan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi

SEKTOR	REALISASI					PROYEKSI				
	TAHUN -5	TAHUN -4	TAHUN 3	TAHUN -2	TAHUN -1	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengembangan Kawasan Permukiman										
Penataan Bangunan dan Lingkungan										
Pengembangan SPAM										
Pengembangan PLP										
Total Belanja APBD Bidang Cipta Karya										
Total Belanja APBD										

Keterangan Pengisian :

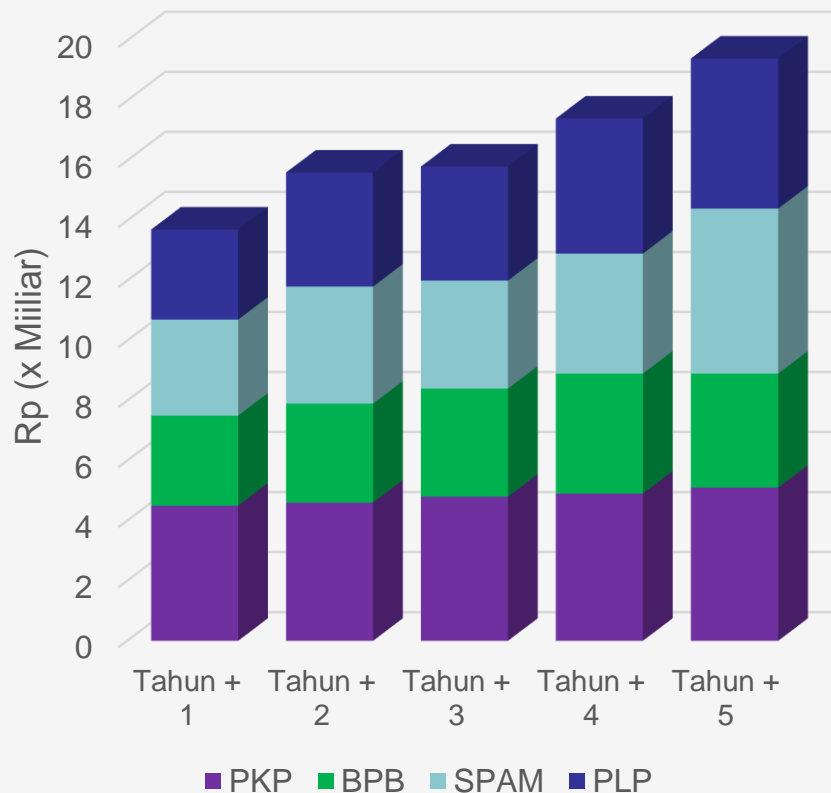
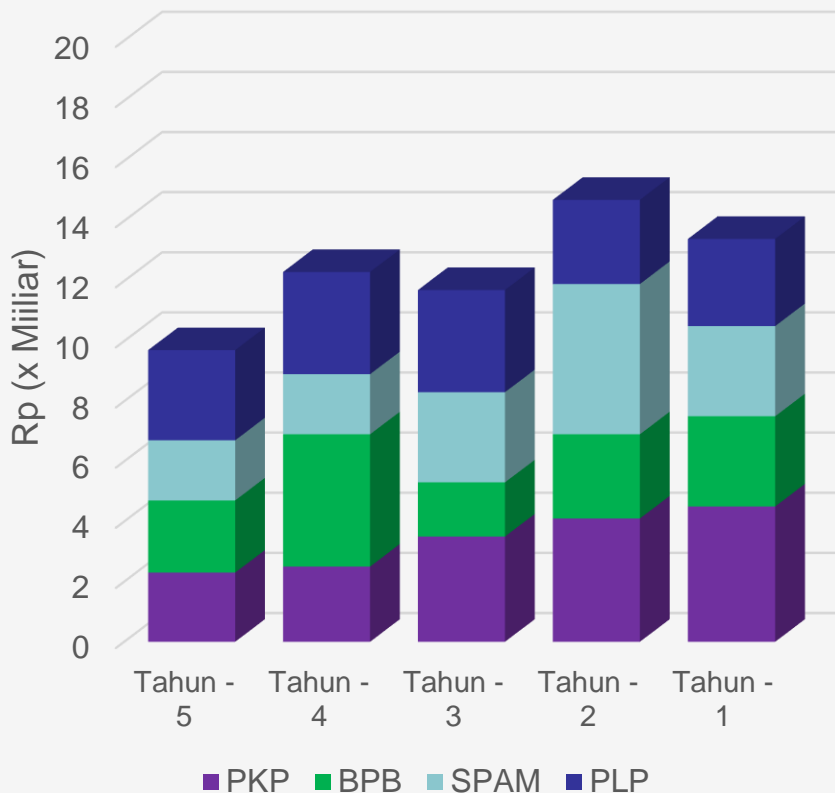
(1) Sektor Cipta Karya

(2), (3), (4), (5), (6) Tahun Realisasi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke belakang

(7), (8), (9), (10), (11) Tahun proyeksi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan

7

Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya



Contoh Grafik Perkembangan Proporsi Pendapatan dan Belanja dalam APBD

7

Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.2 Potensi Pendanaan APBN

Bagian ini berisikan potensi pendanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya di kabupaten/kota.

Matriks Potensi Pendanaan Bersumber APBN

SEKTOR	REALISASI				
	TAHUN -5	TAHUN -4	TAHUN 3	TAHUN -2	TAHUN -1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan Kawasan Permukiman					
Penataan Bangunan Dan Lingkungan					
Pengembangan SPAM					
Pengembangan PLP					
DAK Air Minum					
DAK Sanitasi					
Total Alokasi APBN					

Keterangan Pengisian :

(1) Sektor Cipta Karya

(2), (3), (4), (5), (6) Tahun Realisasi kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke belakang

7

Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.3 Alternatif Sumber Pendanaan

Bagian ini berisikan potensi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, di luar APBN dan APBD, antara lain melalui KPS, CSR, dan sebagainya. Untuk kegiatan yang layak secara finansial dapat dibangun dengan skema KPS, sedangkan kegiatan yang tidak layak secara finansial dapat diusulkan kepada swasta sebagai CSR.

Contoh Matriks Potensi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya melalui KPS

NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	BIAYA KEGIATAN (RP)	KELAYAKAN FINANSIAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			IRR = ...	

Keterangan pengisian :

- (1) Nama kegiatan yang berpotensi untuk KPS/CSR
- (2) Deskripsi teknis dan komponen kegiatan KPS/CSR
- (3) Nilai Kegiatan
- (4) Kelayakan finansial ditunjukkan dengan nilai IRR (Internal Rate of Return)
- (5) Penjelasan/status kegiatan potensi KPS/CSR

7

Pedoman Penyusunan Bab 5 Kerangka Strategi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

5.4 Strategi Peningkatan Investasi Bidang Cipta Karya

Satgas RPIJM daerah perlu merumuskan strategi peningkatan investasi pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, yang meliputi:

- i. peningkatan DDUB oleh kabupaten/kota dan provinsi;
- ii. Peningkatan Penerimaan Daerah dan Efisiensi Penggunaan Anggaran;
- iii. Peningkatan Kinerja keuangan perusahaan daerah;
- iv. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya;
- v. Pendanaan untuk operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman yang sudah ada;
- vi. Pengembangan infrastruktur skala regional.

8

Pedoman Penyusunan Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

6.1 Kerangka Kelembagaan

Bagian ini berisikan kondisi kelembagaan di kabupaten/kota, antara lain mengenai organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Beberapa hal yang perlu ditampilkan antara lain:

- i. Struktur organisasi, tugas, dan fungsi masing-masing unit yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya
- ii. Potensi dan persoalan terkait dengan organisasi dan tata laksana pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya
- iii. Analisis kebutuhan SDM dibandingkan dengan kondisi eksisting

6.2 Kerangka Regulasi

Bagian ini berisikan gambaran umum kerangka regulasi yang sudah ada dan regulasi yang diperlukan Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya pada pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.

8

Pedoman Penyusunan Bab 6 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi Kabupaten/Kota

Matriks Kebutuhan Regulasi

NO	ARAH REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	SUBSTANSI ARAHAN REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan pengisian :

- (1) Nomor
- (2) Nama Perda/Perbub/Perwali yang sudah ada atau yang dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota
- (3) Alasan pembentukan regulasi
- (4) Isi dan arahan regulasi eksisting atau yang dibutuhkan
- (5) SKPD yang bertanggung jawab
- (6) Institusi/SKPD lain yang terkait
- (7) Waktu target penyelesaian regulasi

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.1 Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan program dan pembiayaan dalam pengembangan kawasan permukiman, khususnya dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.

7.1.1 Kondisi Eksisting, berisikan:

- i. Data kondisi eksisting kawasan kumuh, sebagai baseline perencanaan pembangunan menuju 100-0-100, dilengkapi dengan SK bupati/walikota
- ii. Kondisi eksisting permukiman perdesaan, permukiman nelayan, rawan bencana, perbatasan, dan pulau kecil
- iii. Potensi dan tantangan pengembangan kawasan permukiman
- iv. Pemetaan dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan di kabupaten/kota terkait dengan pembangunan kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.1.2 Sasaran Program, merupakan tahapan selanjutnya dari identifikasi kondisi eksisting. Sasaran program mengaitkan kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor pengembangan kawasan permukiman baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

Contoh Matriks Sasaran Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	TOTAL LUAS KAWASAN	SASARAN PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Kawasan Kumuh Perkotaan Ha Ha Ha Ha Ha Ha	
II	Kawasan Permukiman Perdesaan Ha Ha Ha Ha Ha Ha	
III	Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan, Perbatasan, Pulau Kecil, Rawan Bencana dsb) Ha Ha Ha Ha Ha Ha	

Keterangan pengisian :

(1) Nomor

(2) Jenis kawasan permukiman

(3) Total luas kawasan permukiman eksisting

(4), (5), (6), (7), (8) Sasaran luas penanganan kawasan permukiman dari tahun ke I hingga ke V

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.1.3 Usulan Kebutuhan Program, berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor pengembangan kawasan permukiman yang dijabarkan setiap tahunnya.

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS KAWASAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Kawasan Kumuh Perkotaan Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						
II	Kawasan Permukiman Perdesaan Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						
III	Kawasan Permukiman Khusus (Permukiman Nelayan, Perbatasan, Pulau Kecil, Rawan Bencana dsb) Ha						
	1. Kawasan Ha						
	2. Kawasan dst Ha						

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis kawasan permukiman, (3) Luas total kawasan permukiman eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan Rencana kegiatan selama 5 tahun, (9) Keterangan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					READINESS CRITERIA			
	INDIKATOR OUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGELOLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

((1) Nomor urut
(2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan Permukiman
(5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
(7) Volume Kegiatan
(8) Satuan
(9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
(14), (15), (16), (17) Kesiapan Readness Criteria

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.2 Sektor Penataan Bangunan Dan Lingkungan

Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan program dan pembiayaan dalam penataan bangunan dan lingkungan, khususnya dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.

7.2.1 Kondisi Eksisting, berisikan:

- i. Data kondisi Perda Bangunan Gedung dan NSPK lainnya di kabupaten/kota (IMB, SLF, TA-BG, dan Pendataan BG)
- ii. Kondisi kota pusaka, kota hijau (RTH, Kebun Raya, Bangunan Gedung Hijau) dan kawasan strategis lainnya
- iii. Potensi dan tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan
- iv. Data lain yang terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.2.2 Sasaran Program, merupakan tahapan selanjutnya dari identifikasi kondisi eksisting. Sasaran program mengaitkan kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor penataan bangunan dan lingkungan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

Contoh Matriks Sasaran Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	SASARAN PENANGANAN	SASARAN PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung m ²						
II	Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis m ²						
III	Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan Kawasan						
IV	Pengembangan RTH m ²						
V	Fasilitasi Ruang terbuka Publik/ Edukasi dan Partisipasi Masy. Kecamatan						
VI	Turbinwas BG % Bangunan ber IMB						

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis kegiatan PBL (3) Sasaran penangan 2015-2019, (4),(5),(6),(7),(8) Sasaran Program selama 5 tahun, (9) Keterangan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.2.3 Usulan Kebutuhan Program, berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dijabarkan setiap tahunnya.

• **Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan**

NO	KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	SATUAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
	1. Bangunan	m ²						
	2. Bangunan	m ²						
II	Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis							
	1. Kawasan	m ²						
	2. Kawasan	m ²						
III	Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan							
	1. Kawasan	Kawasan						
	2. Kawasan	Kawasan						
IV	Pengembangan RTH							
	1. RTH	m ²						
	2. RTH	m ²						
V	Fasilitasi Ruang terbuka Publik/ Edukasi dan Partisipasi Masy.							
	1. Kecamatan							
	2. Kecamatan							

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Jenis keg. PBL (3) Satuan, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan rencana program selama 5 tahun, (9) Keterangan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGELO OLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.3 Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan program dan pembiayaan dalam pengembangan SPAM, khususnya dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.

7.3.1 Kondisi Eksisting, berisikan:

- i. Data pelayanan air minum, baik perpipaan maupun non perpipaan
- ii. Luas cakupan pelayanan per kecamatan
- iii. Lokasi dan kapasitas air baku
- iv. Kinerja PDAM
- v. Potensi dan tantangan Pengembangan SPAM
- vi. Serta data-data lain, baik kuantitatif maupun kualitatif

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.3.2 Sasaran Program, merupakan tahapan selanjutnya dari identifikasi kondisi eksisting. Sasaran program mengaitkan kondisi eksisting dengan target yang harus dicapai. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor pengembangan SPAM baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

Contoh Matriks Analisis Kebutuhan Sektor Pengembangan SPAM

NO.	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSTING	SASARAN PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Perpipaan						
	Kebocoran (%)	... %					
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	... %					
	Kapasitas Terpasang Lt/Detik					
	Idle Capacity	..., Lt/detik					
2.	Sistem Bukan Perpipaan						
	Cakupan Pelayanan Penduduk (%)	... %					
	Kapasitas Terpasang Lt/Detik					
3.	Kinerja PDAM						
	Aspek Keuangan (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek Pelayanan (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek Operasional (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					
	Aspek SDM (Skor penilaian BPPSPAM)	Skor:					

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Uraian, (3) Kondisi eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Rencana selama 5 tahun

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.3.3 Usulan Kebutuhan Program, berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor pengembangan SPAM yang dijabarkan setiap tahunnya.

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Program Sektor Pengembangan SPAM

NO	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPAM	SATUAN	RENCANA PROGRAM					KET
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	SPAM Regional							
	1. Wilayah	Lt/detik						
II	SPAM Perkotaan							
	1. Kecamatan	Lt/detik						
	2. Kecamatan	Lt/detik						
III	SPAM Perdesaan							
	1. Desa	Lt/detik						
	2. Desa	Lt/detik						
IV	SPAM Kawasan Khusus							
	1. Kawasan Kumuh	Lt/detik						
	2. Kawasan Nelayan	Lt/detik						
	3. Desa Rawan Air	Lt/detik						
V	Peningkatan Kinerja PDAM							

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Kegiatan SPAM, (3) satuan liter/detik, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan rencana program pengembangan SPAM selama 5 tahun, (9) Keterangan

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Matriks Usulan Kebutuhan Pembiayaan Sektor Pengembangan SPAM

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN	PENGELO OLA
			RINCIAN													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SPAM																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan SPAM
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.4 Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan program dan pembiayaan dalam pengembangan PLP, khususnya dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.

7.4.1 Kondisi Eksisting, berisikan:

- i. Data terkait pengelolaan air limbah eksisting (terpusat maupun setempat)
- ii. Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di kabupaten/kota (TPA dan 3R)
- iii. Kondisi eksisting drainase permukiman
- iv. Tantangan dan permasalahan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.4.2 Sasaran Program, merupakan tahapan selanjutnya dari identifikasi kondisi eksisting. Sasaran program mengaitkan kondisi eksisting dengan target kebutuhan yang harus dicapai. Terdapat arahan kebijakan yang menjadi acuan penetapan target pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor pengembangan PLP baik di tingkat Pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

NO.	URAIAN SASARAN PROGRAM	KONDISI EKSISTING	SASARAN PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Pengolahan Air Limbah						
	Cakupan Pelayanan SPAL Terpusat	... %					
	Cakupan Pelayanan SPAL Setempat	... %					
	Kapasitas IPLT	...M3					
2.	Pengelolaan Persampahan						
	Cakupan Pelayanan Persampahan	... %					
	Jumlah sampah diolah dari sumber (3R)	...M3					
	Jumlah sampah diolah di akhir (TPA)	...M3					
3.	Drainase Permukiman						
	Luas genangan di permukiman	... Ha					

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Sasaran Program, (3) Kondisi eksisting, (4),(5),(6),(7),(8) Sasaran program selama 5 tahun

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

7.4.3 **Usulan Kebutuhan Program**, berisikan rincian usulan hasil identifikasi kebutuhan program untuk pencapaian sasaran program sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang dijabarkan setiap tahunnya.

Contoh Matriks Usulan Program Sektor Pengembangan PLP

NO.	Kegiatan Pengembangan PLP	Satuan	RENCANA PROGRAM				
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sistem Pengolahan Air Limbah						
	SPAL Terpusat Skala Kota	KK/Kawasan					
	SPAL Terpusat Skala Kawasan	KK/Kawasan					
	SPAL Komunal ...	KK/Kawasan					
2.	Pengelolaan Persampahan						
	Infrastruktur Persampahan TPA	TPA					
	Infrastruktur Persampahan TPST/3R	Kawasan					
	Fasilitas Pengolah Sampah Sementara	Unit					
	Fasilitas Pevadahan, Pengumpul, dan Pengangkutan	Unit					
3.	Drainase Permukiman						
	Penanganan Drainase permukiman	Ha					

Keterangan pengisian :

(1) Nomor, (2) Kegiatan PPLP, (3) Satuan, (4),(5),(6),(7),(8) Usulan Rencana Program selama 5 tahun

9

Pedoman Penyusunan Bab 7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Contoh Matriks Usulan Pembiayaan Sektor Pengembangan PLP

NO	OUTPUT			LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA					RREADINESS CRITERIA			
	INDIKATOROUTPUT							APBN	APBD PROV	APBD KAB /KOTA	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/UKL/UPL	LAHAN	PENGELOLA
	RINCIAN															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PLP																
1																
		1.a														
		1.b														
		...														
2																
		2.a														
		2.b														
		...														
3...																
	TOTAL															

(1) Nomor urut
 (2), (3), (4) output, indikator output, dan rincian kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya untuk sector Pengembangan PLP
 (5) Lokasi kegiatan

(6) Tahun Kegiatan
 (7) Volume Kegiatan
 (8) Satuan
 (9), (10), (11), (12), (13) Sumber pembiayaan kegiatan yang bersumber dari matriks usulan program
 (14), (15), (16), (17) Kesiapan Readiness Criteria

10

Pedoman Penyusunan Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap bab 7, maka dapat disusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta Karya. Rencana ini harus menjabarkan skenario pengembangan kabupaten/kota dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis kebutuhan, ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas penanganan, dan rencana pelaksanaan program investasi.

10

Pedoman Penyusunan Bab 8 Memorandum Program Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

Matriks Memorandum Program Investasi Kabupaten/Kota

NO	SEKTOR	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	VOL.	SATU AN	TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN (RP)						READINESS CRITERIA				DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS	
							APBN	DAK	APBD PROV	APBD KAB/KOTA	BUMD	KPS	CSR	DED/ FS	AMDAL/ UKL/UPL	LAHAN		PENGEL OLA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Ketua Satgas RPIJM
(22)

Ketua Bappeda
(23)

() ()

Keterangan Pengisian :

- (1) Nomor urut
- (2) Sektor bidang Cipta Karya dan usulan program pembangunan
- (3) Rincian kegiatan pengembangan prasarana Cipta Karya
- (4) Lokasi kegiatan
- (5) Volume kegiatan
- (6) Satuan dari volume kegiatan
- (7) Tahun pelaksanaan kegiatan
- (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) Sumber pembiayaan
- (17), (18), (19), (20) Readiness Criteria
- (21) Dukungan terhadap kebijakan strategis (misal: WPS/RPJMN/RPJMD dsb. (lihat bab 3))
- (22) Tanda tangan ketua satgas RPIJM, (23) Tanda tangan ketua Bappeda



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

CONTACT PERSON:

Subdit Keterpaduan Perencanaan & Kemitraan
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Phone. (021) 72796582
Email. jakstra.bpck@gmail.com